IDN/ANTARA

PENJUALAN KUE KERANJANG MENJELANG TAHUN BARU IMLEK 2575

Pedagang menata kue keranjang yang dijual di rumah makan Singkawang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (31/1). Menurut pedagang menjelang Tahun Baru Imlek 2575 pesanan kue keranjang mencapai 700 biji dengan harga Rp35 ribu hingga Rp65 ribu tergantung ukuranya.

BANGUN LIMA SEKOLAH BARU

Pemprov Banten Entaskan Sekolah Filial di Kab.Tangerang

Pemkab Tangerang mengapresiasi atas sarana dan prasarana pendidikan yang dibangun Pemprov Banten di Kabupaten Tangerang. "Ini sangat penting untuk menjamin proses pembelajaran di sekolah, sehingga terselenggara dengan nyaman," kata Staf Ahli Bupati Tangerang, Prima Saraspuspa.

TANGERANG (IM)- Sejak 2022 sampai 2023, Pemprov Banten sudah membangun 26 SMA/SMk/SKh negeri di Kabupaten Tangerang. Jumlah itu terdiri dari 13 SMA negeri, 12 SMK negeri, dan satu SKh negeri.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Tabrani mengatakan, dari 26 unit sekolah yang telah dibangun, ada lima unit sekolah baru (USB). "Dua SMKN di Kecamatan Curug (SMKN 13 Kabupaten Tangerang-red) dan Cikupa (SMKN 14 Kabupaten Tangerang-red)," ujar Tabrani saat peresmian hasil pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang yang dipusatkan di SMKN 13 Kabupaten Tangerang, Rabu (31/1).

Selain itu, lanjutnya, ada juga tiga SMAN yang dibangun di Kabupaten Tangerang yaitu SMAN 30 Kabupaten Tangerang, SMAn 31 Kabupaten Tangerang, dan SMAN 32 Kabupaten Tangerang. "SMA negeri yang dibangun USB adalah sekolah-sekolah yang bertahun-tahun numpang di SD dan madrasah," tuturnya.

Selain pembangunan USB, ia juga mengaku, ada pembangunan ruang kelas baru (RKB), laboratorium, ruang guru, perpustakaan, toilet, dan ruang-ruang lain untuk kelangsungan belajar yang lebih baik. Pembangunan tersebut telah selesai dikerjakan. "Sesuai arahan gubernur, SMAN dan SMKN telah dimanfaatkan oleh sekolah. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dan petunjuk sehingga sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan, alhamdulillah bisa selesai," terangnya.

Untuk SMKN 13 Kabupaten Tangerang, Tabrani menjelaskan bahwa sekolah itu adalah baru, sehingga baru ada siswa kelas 10. Namun untuk bangunannya telah dilengkapi ruang kelas baru (RKB) dan ruang praktik siswa (RPS) untuk mengantisipasi saat ada siswa baru nanti.

"Insya Allah tahun ini hingga tahun depan akan dilengkapi dengan alat praktik sesuai dengan kebutuhan," ujar mantan Kepala Dindikbud Kota Tangerang ini.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Tangerang, Prima Saraspuspa mengatakan, Pemkab Tangerang mengapresiasi atas sarana dan prasarana pendidikan yang dibangun Pemprov Banten di Kabupaten Tangerang. "Ini sangat penting untuk menjamin proses pembelajaran di sekolah, sehingga terselenggara dengan nyaman," ujarnya.

Mewakili Pj Bupati Tangerang, ia mengaku Pemkab Tangerang berterima kasih atas pembangunan yang telah dilakukan Pemprov Banten di Kabupaten Tangerang. Selain itu, Pemkab Tangerang juga berterima kasih atas bantuan sosial yang diberikan Pemprov termasuk bantuan keuangan dan alokasi dana desa yang digulirkan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, karena sumber pendanaan berasal dari masyarakat. "Dan ini oleh kita semua dan untuk masyarakat. Maka manfaatkanlah betul sarana prasarana ini sebaik-baiknya," ujarnya.

Ia berharap para siswa, guru, dan kepala sekolah menjaga, merawat, dan menggunakan sarana prasarana ini secara baik, bijaksana, dan arif. Dengan makin dilengkapi sarana prasarana, maka infrastruktur yang ada menjadi daya dukung bagi pengembangan pendidikan.

Mengembangkan lingkungan ini menjadi lingkungan yang baik dan sejuk. Hijaukan dengan tanam pohon. Apalagi beberapa waktu lalu, Banten punya problem pencemaran udara.

Setiap siswa minimal punya satu pot atau tanaman yang dirawat dengan baik, sehingga mengedukasi siswa untuk sayang tanaman. Selain memiliki dampak ekonomi, ada juga dampak sosial dari penanaman pohon, seperti mencegah banjir dan longsor. Usai di SMKN 13 Kabupaten Tangerang, Al juga meninjau bangunan SMAN 30 Kabupaten Tangerang. ● **pp**

Pemkot Tangerang Hapus Retribusi Tanah Makam

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota Tangerang resmi menggratiskan biaya perpanjangan penggunaan tanah makam. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni mengatakan, pembebasan biaya retribusi perpanjangan tanah makam sudah dilakukan sejak Januari 2024.

"Kami telah menetapkan biaya retribusi perpanjangan penggunaan tanah makam mulai tahun ini ditiadakan atau gratis. Tentunya penerapan ini dikhususkan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola oleh Pemkot Tangerang, yaitu TPU Selapajang Jaya, TPU Batet, TPU Kedaung Wetan, dan TPU Mekarsari," ujarnya, Rabu (31/1).

Taufik juga mengungkapkan, sebelumnya penetapan biaya retribusi IPPTM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yakni sebesar Rp25 ribu per tiga tahun pertama, kemudian tiga tahun selanjutnya dikenakan Rp50 ribu, setelah itu Rp75 ribu per tiga tahun, dan pada tiga tahun keempat biaya retribusi makam dikenakan Rp100 ribu.

"Setelah biaya retribusi sudah sampai Rp100 ribu, maka selanjutnya akan kembali ke biaya awal yakni Rp25 ribu per tiga tahunnya, hingga seterusnya.

Ini masih berlaku bagi pemohon yang Izin Perpanjangan Makamnya habis atau jatuh tempo pada 31 Desember 2023 dan sebelumnya," ungkapnya.

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini dapat mengajukan permohonan secara online melalui perizinanonline.tangerangkota.go.id.

Untuk mendapat layanan tersrbut, pemohon dapat melampirkan scan/foto kamera Surat Izin Penggunaan Tanah Makam yang lama atau dapat juga menyertakan Surat Keterangan dari kepala UPT Pemakaman, sertakan scan atau foto kamera KTP dan Kartu Keluarga ahli waris, pastikan posisi tidak miring atau terbalik.

"Setelah diajukan permohonan melalui online, akan dilakukan pemeriksaan administrasi, serta peninjauan lokasi makam. Apabila sudah sesuai, maka kami akan mengirimkan surat keputusan izin melalui email pemohon," tambahnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pajak Daerahj dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menerapkan izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam (IPPTM) tidak dipungut biaya retribusi atau gratis.

Penetapan ini mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2024 ini berlaku untuk pemohon yang Izin perpanjangan makamnya habis atau jatuh tempo pada 1 Januari 2024 dan seterusnya. ● **pp**

Merasa Dizalimi, Ratusan Pensiunan PT KS Kembali Unjuk Rasa

CILEGON (IM)- Ratusan pensiunan PT Krakatau Steel (KS) Group yang tergabung dalam Perhimpunan Pensiunan Krakatau Steel (PPKS) kembali melakukan demo di kantor Direksi PT Krakatau Steel Cilegon, Rabu (31/1). Dalam aksinya itu, mereka keberatan dan mengeluhkan penghapusan kenaikan 5 persen dana pensiun setiap tahunnya dan menuntut agar PT KS Group mengembalikan hak pensiunan yang dihapus sejak tahun 2020.

Tim Kecil PPKS, Leopold Sitompul mengatakan, aksi hari ini merupakan unjuk rasa (unras) lanjutan, lantaran tuntutan dari aksi-aksi sebelumnya masih belum direspon oleh pihak Direksi PT KS Group. "Kami terus perjuangkan hak kami, yang diubah semena-mena oleh PT KS dengan menghapuskan kenaikan 5 persen dana pensiun setiap tahunnya," tutur Leo di sela unjuk rasa di depan kantor Direksi PT KS, Rabu 31 Januari 2024.

Diterangkannya, dengan kebijakan tersebut PT KS terlepas dari kewajiban ke DAPEN-KS sebesar USD 100 juta atau sekira Rp 1,5 triliun lebih. Sehingga dengan terlepasnya kewajiban itu PT KS meraih keuntungan besar sejak tahun kinerja 2020, setelah sebelumnya selalu rugi besar selama delapan tahun berturut-turut sejak tahun 2012.

"Jadi kami merasa dirampok dan dizalimi dengan kebijakan itu, karena dengan keuntungan tersebut PT KS tetap membayar kewajiban ke krediturnya, sementara kewajiban ke DAPEN-KS malah dihapus yang mengakibatkan sebagian dari hak pensiunan KS dan KS Group hilang," paparnya.

Dengan demikian, dirinya bersama ribuan pensiun KS dan KS Group berharap penghapusan kenaikan 5 persen dana pensiun setiap tahunan itu minta dikembalikan dan dibayar seluruhnya sejak diberlakukan. ● **pra**

BPBD Lebak: Dulu Warga Terdampak Pergerakan Tanah Menolak Relokasi

LEBAK (IM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mencatat ada 29 rumah warga yang terdampak pergerakan tanah di Kampung Jampang, Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, pada Januari 2024.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama menyebutkan, terkait dengan adanya puluhan rumah warga yang terdampak pergerakan bahwa warga tersebut merupakan warga yang memilih untuk bertahan waktu ada bencana pergerakan tanah pada 2019.

"Dapat disampaikan, bahwa pergerakan tanah yang ada di Cimarga, merupakan imbas kejadian pada tahun 2019 lalu. Sudah kami telusuri ke lapangan memang terdapat rumah-rumah yang rusak," kata Febby, Rabu (31/1).

Febby menjelaskan, saat itu pihaknya sudah melakukan pendataan serta sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat yang terdampak dan tidak. Karena ada rekomendasi dari Badan Geologi untuk tidak ditempati lagi.

"Karena sudah ada rekomendasi tersebut, dari Badan Geologi untuk daerah tersebut tidak ditempati. Karena tanahnya, baik hari ini sampai nanti, akan mengalami kerusakan," jelasnya.

Untuk diketahui bencana pergerkan tanah di Kampung Jampang, Desa Sudamanik, terjadi pada tahun 2019 silam dan merusak 129 rumah. Namun hingga saat ini masih ada warga yang memilih bertahan dan tak mau direlokasi.

"Setelah kami melakukan musyawarah, dari 129 rumah yang kami petakan. Ada sekitar 70-an yang sepakat, yang memilih untuk direlokasi, dan itu sudah kita berikan bantuannya," ucapnya.

"Nah untuk masyarakat yang tidak kenapa-napa dan menolak untuk direlokasi, akhirnya kita tidak bisa mengintervensi, mereka memilih bertahan di sana," sambung Febby.

Saat ini masih ada 29 rumah yang bertahan sejak tahun 2019 hingga saat ini. Febby menyebutkan, dari 29 rumah yang terdamak dan masih bertahan, dua rumah sudah menerima bantuan relokasi dari BPBD Kabupaten Lebak.

"Jadi dari 29 itu, sebenarnya yang dua itu sudah menerima bantuan. Dan untuk yang 27 belum karena mereka menolak untuk direlokasi. Kami akan koordinasikan dengan pimpinan karena masih ada surat di atas materai bahwa memang mereka menolak relokasi," ucapnya.

Ditambahkannya, seiring waktu, rumah warga tersebut rusak karena terdampak pergerakan tanah. Saat ini rumah tersebut dalam kondisi memprihatikan.

"Tapi di sini negara tetap hadir, dan kami akan melakukan pemantaun kesana, dan kami juga akan kordinasikan dengan pimpinan," pungkasnya. ● **pra**

Kantor PWI DIY akan Dirobohkan, akan Dibangun Gedung Grha Pers Pancasila

YOGYA (IM)- Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan dirobohkan. Selanjutnya, lokasi di Jalan Gambiran 45 Yogyakarta itu akan dibangun Gedung Grha Pers Pancasila.

Grha Pers Pancasila nantinya menjadi pusat pendidikan dan pengembangan pers kebangsaan di Indonesia. Kepengurusan PWI Pusat 2023-2028 memprogramkan sosialisasi pers kebangsaan ke berbagai daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usai mendapat informasi soal legalitas aset tanah dan komitmen dari Pemprov DIY yang disampaikan Sekda DIY, Beny Suharsono, Selasa (30/1), Ketum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun langsung meninjau lokasi yang akan dibangun Grha Pers Pancasila di Jalan Gambiran 45 Yogyakarta.

Hendry Ch. Bangun bersama Sasongko Tedjo (Ketua Dewan Kehornatan PWI Pusat), Sihono HT (Direktur Pers Pancasila PWI Pusat), didampingi Hudono (Ketua PWI DIY), Swasto Dayanto (Sekretaris PWI DIY), dan Agus Susanto (Bidang Keanggotaan) melihat langsung kondisi bangunan kantor PWI DIY itu.

"Ternyata cukup luas, ada ruang pertemuannya juga," ujar Hendry Ch. Bangun setelah masuk kantor PWI DIY. Dari depan kelihatannya kecil, tetapi setelah masuk ternyata cukup besar dan cocok untuk dibangun Grha Pers Pancasila berlantai empat.

Tanah yang saat ini untuk kantor PWI DIY lebar depannya 16,5 meter dan panjangnya 54 meter. Mengacu pada pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor 449/Peng-13.05/XI/2017 tanggal 05/11/2017, tanah dipergunakan untuk PWI Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan keterangan Sekda DIY, Beny Suharsono, untuk status aset tanah sudah clear. Aset tanah milik Pemprov DIY dan PWI DIY diberi wewenang Hak Pakai. "Jadi untuk masalah aset tanah sudah clear. Mau dibangun kapan saja silakan," tegas Beny Suharsono.

Saat memberikan penjelasan kepada pengurus PWI Pusat dan PWI DIY di Ruang Rapat Sekda Kompleks Kepatihan, Selasa (30/1), Beny Suharsono didampingi Kepala Dinas Kominfo DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, Kepala BPKA DIY Wiyos Santoso, dan para kepada bidang dinas terkait.

Ketum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun memprogramkan bulan April 2024 semua administrasi syarat pembangunan Grha Pers Pancasila sudah selesai. Sehingga bisa segera dicarikan dana untuk pembangunannya. "Kita kerja secara paralel, PWI Pusat akan berkoordinasi dengan kementerian dan PWI DIY terus berkoordinasi dengan Pemprov DIY," tegas Hendry.

Sedangkan Sekda DIY segera melapor ke Gubernur, tentang hasil pertemuannya dengan PWI Pusat. Menurut Beny Suharsono ada tiga hal yang akan disampaikan ke Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pertama, status tanah yang akan dibangun Graha Pers Pancasila hak pakai milik Pemprov DIY. Kedua, aset gedung milik PWI, dan ketiga, anggaran pembangunan akan diupayakan PWI Pusat. ● **ber**

IST

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun saat meninjau Kantor PWI DIY.

IDN/ ANTARA

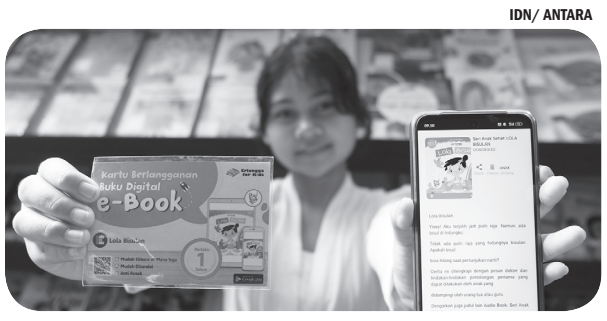

PELUNCURAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Siswa menunjukkan buku digital melalui ponsel dan kartu e-book saat peluncuran perpustakaan digital di SD Saraswati 2 Denpasar, Bali, Rabu (31/1). Perpustakaan digital yang disediakan bagi siswa tersebut berisi ribuan buku dengan berbagai kategori yang bisa diakses melalui komputer, laptop, dan ponsel untuk meningkatkan minat baca di era digital.

Pj Bupati Tangerang Minta PHRI Rangkul dan Promosikan UMKM

TANGERANG (IM)- Pj Bupati Tangerang, Andi Ony meminta kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Tangerang merangkul dan mempromosikan produk-produk unggulan UMKM Kabupaten Tangerang untuk maju bersama.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pj Andi Ony saat menghadiri Muscab PHRI Kabupaten Tangerang Di Episode Hotel Gading Serpong Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. "Saya minta kepada PHRI Kabupaten Tangerang untuk juga mengajak dan mempromosikan produk-produk unggulan UMKM Kabupaten Tangerang dan maju bersama. Kita harus membantu mengembangkan usaha lokal," katanya, Rabu (31/1).

Ia juga sangat mengapresiasi PHRI yang terus berkolaborasi dan berinovasi dalam membangkitkan kembali perekonomian daerah yang terpuruk dihantam Covid-19. "Terima kasih kepada PHRI dan seluruh anggotanya. Terus semangat, berkolaborasi dan berinovasi. Tidak menyerah, bangkit dari keterpurukan akibat Covid-19," ungkapnya.

Pj Andi Ony berharap kebangkitan dan semangat para pelaku usaha perhotelan dan restoran juga dapat memberikan semangat bagi para pelaku UMKM untuk tidak mudah menyerah pada keadaan dan terus mengembangkan diri dan mampu bersaing.

"Saya harap perjuangan dan semangat para pelaku usaha perhotelan dan restoran yang bangkit dari keterpurukan dapat menjadi contoh bagi para pelaku UMKM Kabupaten Tangerang untuk terus berinovasi dan mampu bersaing," pungkasnya. ● **pp**